

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, dimana bentuk kekuasaan pemerintahan berada ditangan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan rakyat yang memiliki hak, kewajiban, kebebasan berpendapat serta berhak mengemukakan pendapat seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28E ayat (3) yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam implementasi bentuk kedaulatan rakyat secara demokratis yaitu pelaksanaan pemilihan umum, kaitannya adalah masyarakat bebas menggunakan hak politiknya untuk menentukan pilihannya.

Dimulainya pemilu secara demokratis oleh rakyat Indonesia yaitu pada tahun 1999 tepat setelah runtuhnya orde baru. Sedangkan pemilihan kepala daerah pertama kali diselenggarakan pada tahun 2005. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pilkada merupakan salah satu wujud dari sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah ini memiliki tujuan untuk penguatan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik. Dalam melaksanakan partisipasi politik masyarakat memerlukan adanya sarana politik yaitu partai politik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 pasal 1 ayat (4) bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena itu partai politik merupakan salah satu jalur pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Demikian partai politik berperan dalam mempersiapkan calon-calon pemimpin dalam hal ini yaitu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam tahap selanjutnya agar lebih banyak diketahui masyarakat, partai politik maupun pasangan calon kepala daerah melakukan kampanye yang telah diselenggarakan waktunya oleh Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 butir 35 yaitu Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri dari peserta pemilu. Dengan begitu sudah menjadi kewajiban setiap partai politik untuk mempromosikan semua informasi-informasi yang menjadi daya tarik masyarakat untuk memilih partai politik yang terbaik, dan juga mampu menghasilkan figur-figur terbaik daerah. Kampanye merupakan suatu tindakan dan usaha yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan. Maraknya penggunaan media sosial sudah bukan menjadi hal baru lagi digunakan sebagai media kampanye di Indonesia. Melihat fenomena ini, partai politik dan kandidat mulai mencari cara lain selain media sosial untuk berkampanye, yaitu dengan menggunakan figur publik untuk mempromosikan program kerja mereka. Dengan begitu komunikasi politik adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk dibangun.

Firmanzah (2008, hlm. 274) kampanye politik adalah proses komunikasi politik dialogis antara partai politik dengan masyarakat. Tujuan komunikasi politik adalah untuk menciptakan kesamaan pemahaman dan persepsi antara partai dengan masyarakat. Untuk mewujudkan kampanye yang sesuai dengan harapan, maka tim pemenang setiap partai politik perlu melakukan promosi dengan cara iklan politik dengan tujuan para pasangan calon dari setiap partai politik dikenal oleh masyarakat, dengan demikian salah satu cara yaitu menggunakan figur publik. Hal inilah yang menyebabkan beberapa partai politik menyertakan sosok figur publik pada pemilihan kepala daerah.

Setiap partai politik tentunya memiliki harapan untuk meraup suara penuh pada pemilihan umum, oleh karena itu pemanfaatan popularitas figur publik merupakan cara ampuh untuk meraup suara penuh pada pemilihan umum. Selain mempunyai popularitas yang tinggi, figur publik ini sendiri pada umumnya mempunyai kemampuan dalam membuat medianya sendiri agar bisa lebih mudah dikenal serta mampu memberikan pengaruh kepada masyarakat.

Arti dari figur publik itu sendiri yaitu seseorang yang dikenal masyarakat luas karena kemampuannya dalam komunikasi maupun dalam kompetensinya. Dengan demikian penggunaan figur publik sangat berpengaruh terhadap citra setiap

partai politik yang kemudian publik yakni masyarakat dengan besar harapan akan percaya untuk memilih calon pemimpin yang diinginkannya. Begitupun cara masyarakat mengenal figur publik tersebut karena seringnya muncul di media. Penggunaan figur publik dalam kampanye maupun sebagai pasangan calon pemimpin. Menurut Praktiko (1982, hlm. 56) menyebutkan bahwa penampilan figur publik merupakan suatu strategi untuk memberikan penekanan, nilai tambah dan mengangkat produk itu menjadi cepat dikenal. Dengan begitu penggunaan figur publik sebagai calon pemimpin kepala daerah merupakan strategi partai politik untuk meraup suara publik yang tinggi.

Salah satu strategi partai politik untuk meraup suara yang tinggi yaitu dengan iklan politik, di sinilah figur publik dapat menarik publik untuk memilih partai politiknya. Menurut Webster (dalam Kertapati, 1982, hlm. 52) periklanan adalah segala bentuk publikasi/pengumuman yang secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk merubah pikiran orang-orang agar membeli barang yang ditawarkan. Dengan begitu teori diatas merupakan iklan yang dapat meningkatkan daya tarik publik, maka dari itu figur publik disini dapat menawarkannya kepada publik. Dengan strategi periklanan calon pemimpin dapat menunjukkan dirinya melalui iklan yang menarik perhatian orang banyak.

Tahun 2018 merupakan tahun diadakannya Pemilihan Kepala Daerah, hal tersebut menjadi agenda politik dengan menyelenggarakan Pemilihan Umum di Daerah. Pilkada serentak tahun 2018 terdapat di 171 daerah, yang digelar di 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Pemungutan suara dilakukan pada tanggal 27 Juni 2018. Provinsi Jawa Barat termasuk menjadi daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak 2018 untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Terdapat 4 kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yaitu Pasangan Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul Ulum menduduki nomor urut 1, TB Hasanudin – Anton Carlyan menduduki nomor urut 2, Sudrajat – Ahmad Syaikhu menduduki nomor urut 3, dan Dedi Mizwar – Dedi Mulyadi menduduki nomor urut 4. Setiap kandidat pasangan calon gubernur Jawa Barat masing-masing mempunyai kelebihan yang mana hal tersebut memudahkan masyarakat untuk memilih. Maka dari itu, ke 4 kandidat tersebut merupakan salah satu dari figur publik yang digunakan partai politiknya. Selain kandidat pasangan calon, partai politik kerap

kali menggunakan figur publik yang lain untuk meyakinkan masyarakat untuk memilihnya.

Pada pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat ini terjadi persaingan yang ketat. Semua partai politik pengusung calon gubernur dan wakil gubernur mempunyai strategi kampanye masing-masing. Nurdiansyah (2018, hlm 63) menyebutkan bahwa setiap partai dan kandidat memiliki citra sendiri di lingkungan di mana ia bergerak. Citra tersebut merupakan gambaran yang ada dalam bayangan masyarakat atau pemilih tentang partai atau kandidat, pada periode tertentu. Terkadang gambaran ini kosong, sehingga masyarakat atau pemilih belum mengenal partai atau kandidat. Oleh karena itu masyarakat terkadang bisa melihat atau mengidentifikasi calon pemimpinnya dari figur publik yang dipakai ketika berkampanye di dalam acara, atau berkampanye melalui media sosial. Bahkan masyarakat pada saat ini sudah tidak dapat terpisahkan dengan media sosial, dan hal ini membuat mereka lebih mudah mengenal calon pemimpinnya.

Setiap figur publik mempunyai kekuatan figurnya dalam partai politik, seperti yang dikemukakan oleh Rido (2016) bahwa masyarakat semakin cerdas dan informasi mudah diraih. Sehingga hal ini mempengaruhi pilihan dan orientasi politik publik. peran mobilisasi dan elit politik yang semakin terbatas. Peran media massa yang semakin gencar sebagai alat kampanye, dan yang keempat perbedaan ideologi-ideologi partai yang semakin tipis, perbedaan antara satu partai dengan partai lainnya sulit dibaca. Kondisi seperti inilah yang membuat publik semakin menjadikan tokoh sebagai referensi untuk memilih partai politik. Dengan demikian hal tersebut menjadi dasar adanya peran penting atau kekuatan khusus dari figur itu sendiri dalam partai politiknya.

Penelitian sebelumnya yaitu tentang pengaruh profil calon kepala daerah terhadap persepsi masyarakat yang menjelaskan penelitian ini dapat digambarkan bahwa pengaruh profil calon kepala daerah memiliki hubungan yang kuat terhadap persepsi kepemimpinan di masyarakat Banten. Dengan dibuktikan dengan responden yang menyatakan setuju. Dengan adanya penelitian tersebut sebelumnya, peneliti melakukan penelitian hal yang sama di daerah Jawa Barat.

Masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan, dan budaya yang

membentuk suatu keteraturan. Masyarakat di Kota Bandung ini banyak berperan dalam berbagai bidang, yaitu dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan IPTEK. Maka dari itu, masyarakat di Kota Bandung merupakan salah satu publik yang menjadi tujuan kampanye partai politik disetiap pemilihan kepala daerah. Dengan banyaknya figur publik yang dikenal, di sinilah masyarakat dengan selektif memilih calon pemimpinnya. Partisipasi politik masyarakat di Kota Bandung termasuk pada partisipasi politik aktif, hal dibuktikan dengan hasil pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat, masyarakat di Kota Bandung telah memberikan kurang lebih 70% suara dengan masyarakat yang termasuk ke dalam daftar pemilih tetap sebanyak 1.659.017, dengan jumlah seluruh suara sah dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah Jawa Barat tingkat Kota Bandung adalah sebanyak 1.279.870 suara dan jumlah suara tidak sah sebanyak 28.465 suara (KPU Jawa Barat). Demikian masyarakat di kota Bandung memiliki kesadaran politik dan kepercayaan yang cukup tinggi kepada pemerintah.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari semua calon pemimpin daerah diperlukannya keterlibatan dari keaktifan pasangan calon untuk lebih membuka wawasan dan kemampuan melalui kampanye politik.

Melihat data yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian sejauh mana penggunaan figur publik dalam kampanye terhadap tingkat perolehan suara. Maka dari itu penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan judul: Pengaruh Penggunaan Figur Publik dalam Kampanye terhadap Tingkat Perolehan Suara pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat tahun 2018 di Kota Bandung.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh penggunaan figur publik dalam kampanye terhadap Pilihan Masyarakat di Kota Bandung pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat tahun 2018?
- 2) Seberapa besar pengaruh penggunaan figur publi dalam kampanye terhadap tingkat perolehan suara Kota Bandung pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat tahun 2018?

- 3) Bagaimana hubungan penggunaan figur publik terhadap tingkat perolehan suara pada pemilihan Wali Kota Bandung 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan maksud penelitian tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- 1) Seberapa besar pengaruh penggunaan figur publik dalam kampanye terhadap pilihan masyarakat di Kota Bandung pada Pilkada Jabar 2018.
- 2) Seberapa besar pengaruh penggunaan figur publik dalam kampanye terhadap tingkat perolehan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat di Kota Bandung tahun 2018.
- 3) Hubungan penggunaan figur publik terhadap tingkat perolehan suara pada pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat di Kota Bandung tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Secara teoritis dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pengaruh penggunaan figur publik dalam kampanye terhadap tingkat perolehan suara di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat tahun 2018.
- b) Diharapkan dapat menjadi masukan pengembangan pembelajaran ilmu politik dalam memberikan pendidikan politik yang efektif untuk meningkatkan partisipasi politik di semua kalangan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a) Bagi peneliti, kegiatan penelitian ini diharapkan menjadi penunjang untuk melatih kemampuan berpikir dan menganalisis dari setiap fenomena politik yang terjadi di Indonesia pada saat pemilihan umum.
- b) Secara praktis bagi semua kalangan, atau masyarakat pada umumnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi serta masukan dalam mendukung keberlangsungan kehidupan

politik yang lebih baik, dan menciptakan politik damai pada saat pemilihan umum.

- c) Bagi semua kalangan atau masyarakat diharapkan bisa menambah masukan dan gambaran mengenai kondisi fenomena politik yang terjadi pada saat pemilihan umum, sehingga masyarakat bisa lebih peduli untuk berperan aktif dan kritis terhadap fenomena politik yang terjadi, serta dapat meningkatkan partisipasi politik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Pendahuluan

Sebagai bab pembuka dalam sebuah skripsi, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

Kajian Pustaka

Dalam bab ini teori-teori yang mendukung, pendapat-pendapat para ahli serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dijadikan penulis sebagai bahan kajian guna memberikan landasan yang kuat akan urgensi penelitian yang diteliti.

Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan.

Temuan dan Pembahasan

Pada bab ini penulis melakukan analisis temuan data dan membahasnya dengan teori-teori yang ada serta data-data yang mendukung. Dengan langkah tersebut akan terlihat masalah-masalah yang diteliti serta pemecahan masalahnya.

Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Sebagai bagian terakhir dalam karya ilmiah skripsi, pada bab ini penulis memberikan simpulan, memaparkan implikasi dan menyajikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai solusi dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam penelitian ini, dan penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat setidaknya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi masyarakat.